



Krisis Ekologis dalam Konflik Manusia dan Gajah akibat Kebijakan Tata Ruang di Sumatera Selatan Perspektif Habermas

Noor Annisa Suci Lestary¹, Putri Adinda², Aulia Salma³, Vieronica Varbi Sununianti⁴, Istiqoma⁵, Deni Aries Kurniawan⁶

Sosiologi, Universitas Sriwijaya, Indonesia¹⁻⁶

Email Korespondensi: noorannisay4@gmail.com, ptriandna08@gmail.com, auliasalma7n@gmail.com, vieronica.varbis@unsri.ac.id, istiqoma@fisip.unsri.ac.id, kurniawandeniaries@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 06 Mei 2026

ABSTRACT

The conflict between humans and elephants in South Sumatra has increased due to deforestation and unsustainable development policies. This research aims to analyze the causes of conflict from ecological, social, and spatial policy aspects using the critical social theory perspective of Jürgen Habermas. The method used is a literature review of scientific sources and policy documents from the period 2015–2025. The results show that the conversion of forests into industrial areas, plantations, and infrastructure causes habitat fragmentation and the reduction of elephant living spaces, prompting elephants to enter settlements and trigger conflicts. Moreover, the weak implementation of policies and the dominance of economic interests exacerbate the situation. From Habermas's perspective, this reflects the dominance of the system over the environment. Therefore, sustainable policies, habitat protection, and community involvement in conservation are necessary.

Keywords: *human-elephant conflict, forest conversion, spatial planning policy, Sumatran elephant, Habermas theory.*

ABSTRAK

Konflik manusia dan gajah di Sumatera Selatan meningkat akibat alih fungsi hutan dan kebijakan pembangunan yang kurang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penyebab konflik dari aspek ekologis, sosial, dan kebijakan tata ruang dengan perspektif teori sosial kritis Jürgen Habermas. Metode yang digunakan adalah studi literatur terhadap sumber ilmiah dan dokumen kebijakan periode 2015–2025. Hasil menunjukkan bahwa perubahan hutan menjadi kawasan industri, perkebunan, dan infrastruktur menyebabkan fragmentasi habitat dan penyusutan ruang hidup gajah, sehingga mendorong gajah memasuki permukiman dan memicu konflik. Selain itu, lemahnya implementasi kebijakan dan dominasi kepentingan ekonomi memperburuk kondisi. Dalam perspektif Habermas, hal ini mencerminkan dominasi sistem terhadap lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan berkelanjutan, perlindungan habitat, dan keterlibatan masyarakat dalam konservasi.

Kata Kunci: *Konflik Manusia-Gajah, Alih Fungsi Hutan, Kebijakan Tata Ruang, Gajah Sumatera, Teori Habermas.*

PENDAHULUAN

Konflik antara manusia dan satwa liar merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang semakin sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara aktivitas manusia dengan keberlangsungan ekosistem alami. Salah satu konflik yang cukup menonjol adalah konflik antara manusia dan gajah yang terjadi di beberapa wilayah Sumatera, termasuk di Provinsi Sumatera Selatan. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus penyerangan gajah terhadap masyarakat di wilayah seperti Musi Rawas dan Ogan Komering Ilir menunjukkan bahwa konflik tersebut tidak dapat dipahami hanya sebagai peristiwa yang bersifat insidental, melainkan sebagai bagian dari persoalan struktural yang lebih luas. Konflik tersebut menunjukkan bahwa ruang hidup antara manusia dan satwa liar semakin menyempit akibat perubahan penggunaan lahan yang terus berlangsung.

Perubahan fungsi hutan menjadi salah satu faktor utama yang memicu terjadinya konflik antara manusia dan gajah. Alih fungsi hutan menjadi kawasan industri seperti hutan tanaman industri (HTI), perkebunan kelapa sawit, serta pembangunan infrastruktur telah menyebabkan berkurangnya habitat alami satwa liar. Kondisi ini menyebabkan jalur migrasi gajah yang sebelumnya terbentuk secara alami menjadi terfragmentasi sehingga memaksa gajah keluar dari habitatnya dan memasuki wilayah permukiman masyarakat untuk mencari makanan dan ruang hidup. Perubahan tutupan lahan hutan dapat menyebabkan terganggunya habitat alami gajah Sumatera sehingga menimbulkan konflik antara manusia dan gajah (Elfi et al., 2025; Harahap et al., 2025).

Secara ekologis, gajah Sumatera merupakan satwa yang membutuhkan ruang hidup yang luas karena memiliki perilaku jelajah yang tinggi. Gajah cenderung berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain untuk mencari sumber pakan serta menjaga keseimbangan ekologis dalam habitatnya. Namun, semakin meningkatnya aktivitas manusia di kawasan hutan menyebabkan ruang hidup gajah semakin terbatas. Kondisi ini tidak hanya meningkatkan intensitas konflik dengan manusia, tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup gajah itu sendiri. Lembaga konservasi dunia International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) menetapkan status gajah Sumatera dalam kondisi kritis atau critically endangered (WWF Indonesia, 2020). Status tersebut menunjukkan bahwa populasi gajah Sumatera menghadapi ancaman serius akibat kerusakan habitat, perburuan, serta konflik dengan manusia.

Selain berkaitan dengan faktor ekologis, konflik antara manusia dan gajah juga tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang memengaruhi pengelolaan sumber daya alam. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar, mulai dari hutan tropis, sumber daya mineral, hingga keanekaragaman hayati yang tinggi. Potensi sumber daya alam tersebut seringkali menjadi basis pembangunan ekonomi yang mendorong berbagai aktivitas eksploitasi sumber daya alam. Namun, pembangunan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan dapat

menimbulkan berbagai permasalahan ekologis seperti deforestasi, degradasi hutan, serta hilangnya habitat satwa liar (Kamim, 2018; Setiawan et al., 2018).

Kebijakan pembangunan yang lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi seringkali mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan. Alih fungsi hutan untuk kepentingan industri dan perkebunan skala besar tidak hanya menyebabkan kerusakan ekosistem, tetapi juga menimbulkan berbagai konflik antara manusia dengan lingkungan sekitarnya. Dalam konteks konflik manusia dan gajah, kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi tidak semata-mata disebabkan oleh perilaku satwa liar, tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan tata ruang dan pengelolaan sumber daya alam yang kurang memperhatikan keseimbangan ekologi (Wulandari & Kusuma, 2023).

Dalam perspektif teori sosial kritis dari Jürgen Habermas, konflik tersebut dapat dipahami sebagai akibat dari dominasi sistem ekonomi dan kebijakan pembangunan terhadap kehidupan sosial dan lingkungan. Habermas menjelaskan bahwa dalam masyarakat modern, sistem ekonomi dan birokrasi negara seringkali mendominasi ruang kehidupan masyarakat (lifeworld), sehingga keputusan pembangunan lebih didasarkan pada kepentingan ekonomi daripada kepentingan ekologis dan sosial (Ardiansyah et al., 2024). Kondisi ini dapat dilihat dalam berbagai kebijakan pemanfaatan ruang yang lebih memprioritaskan aktivitas industri dibandingkan dengan perlindungan lingkungan dan keberlanjutan ekosistem (Pratama et al., 2023).

Dengan demikian, konflik manusia dan gajah di Sumatera Selatan perlu dipahami tidak hanya sebagai persoalan ekologis, tetapi juga sebagai persoalan sosial yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan dan pengelolaan ruang. Analisis terhadap konflik tersebut penting dilakukan untuk memahami akar permasalahan yang terjadi serta untuk mendorong lahirnya kebijakan yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan bagi masyarakat maupun lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik manusia dan gajah di Sumatera Selatan sebagai dampak dari alih fungsi hutan serta meninjau peran kebijakan tata ruang dalam pengelolaan konflik tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (kajian literatur) untuk menganalisis konflik manusia dan gajah di Sumatera Selatan yang berkaitan dengan perubahan fungsi lahan dan kebijakan tata ruang. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami fenomena konflik manusia dan satwa liar secara mendalam dengan melihat hubungan antara aspek ekologis, sosial, serta kebijakan pembangunan yang memengaruhinya. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan dan konservasi satwa liar. Pencarian literatur dilakukan melalui berbagai basis data akademik seperti Google Scholar, Garuda (Garba Rujukan Digital), dan repositori universitas, dengan menggunakan kata kunci antara lain:

konflik manusia-gajah, gajah Sumatera, alih fungsi hutan, tata ruang, kebijakan lingkungan, dan teori Habermas. Kriteria inklusi literatur mencakup: (1) diterbitkan dalam rentang 10 tahun terakhir (2015–2025); (2) relevan dengan topik konflik manusia-satwa, konservasi gajah Sumatera, atau kebijakan lingkungan hidup Indonesia; dan (3) berasal dari jurnal ilmiah terindeks atau laporan lembaga bereputasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menelaah berbagai literatur yang relevan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab konflik manusia dan gajah serta dampak alih fungsi hutan terhadap habitat satwa liar. Selanjutnya, temuan-temuan tersebut dianalisis menggunakan perspektif teori sosial kritis dari Jürgen Habermas untuk melihat bagaimana kebijakan pembangunan, kepentingan ekonomi, serta relasi kekuasaan dalam pengelolaan sumber daya alam dapat memengaruhi munculnya konflik ekologis. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara perubahan fungsi lahan, kebijakan tata ruang, serta konflik antara manusia dan gajah di Sumatera Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa konflik antara manusia dan gajah di Sumatera Selatan berkaitan erat dengan perubahan penggunaan lahan serta kebijakan pembangunan yang berdampak pada kerusakan habitat satwa liar. Alih fungsi hutan menjadi kawasan industri seperti hutan tanaman industri (HTI), perkebunan kelapa sawit, serta pembangunan infrastruktur telah menyebabkan berkurangnya ruang hidup gajah secara signifikan. Kondisi ini menyebabkan jalur migrasi gajah yang sebelumnya terbentuk secara alami menjadi terfragmentasi sehingga gajah terpaksa memasuki wilayah permukiman dan lahan pertanian masyarakat untuk mencari sumber pakan (Elfi et al., 2025; Ferdian et al., 2023).

Perubahan tutupan hutan tersebut memiliki dampak langsung terhadap keberlangsungan habitat satwa liar. Menurut Rencana Tindakan Mendesak (RTM) 2020–2023, habitat gajah Sumatera di Indonesia secara keseluruhan telah mengalami penyusutan hingga 80 persen, terutama di luar kawasan konservasi. Pada tahun 1985, terdapat 44 kantong habitat gajah di seluruh Sumatera, namun jumlah tersebut turun menjadi 22 kantong pada tahun 2021. Gangguan terhadap habitat alami gajah menyebabkan meningkatnya potensi konflik antara manusia dan satwa liar. Upaya konservasi gajah tidak dapat dipisahkan dari upaya pemulihan dan perlindungan habitatnya secara komprehensif (Muslih et al., 2023).

Selain faktor ekologis, hasil kajian juga menunjukkan bahwa konflik manusia dan gajah berkaitan dengan kebijakan tata ruang serta pengelolaan sumber daya alam. Meskipun telah terdapat berbagai regulasi yang mengatur pengelolaan lingkungan, seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, implementasi kebijakan tersebut di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Lemahnya pengawasan serta inkonsistensi dalam pemberian izin usaha menyebabkan alih fungsi hutan tetap terjadi, bahkan

di wilayah yang memiliki nilai ekologis tinggi (Setiawan et al., 2018; Wulandari & Kusuma, 2023).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan seringkali lebih berorientasi pada kepentingan ekonomi dibandingkan dengan perlindungan lingkungan. Aktivitas industri dan perkebunan skala besar yang terus berkembang menyebabkan degradasi habitat satwa liar serta mempersempit ruang hidup gajah. Hal ini tidak hanya meningkatkan intensitas konflik dengan masyarakat, tetapi juga mengancam keberlangsungan populasi gajah Sumatera yang saat ini telah berada dalam kondisi kritis (*critically endangered*) menurut lembaga konservasi dunia IUCN (Rasyid, 2024; WWF Indonesia, 2020).

Jika dilihat dari perspektif teori sosial kritis dari Jürgen Habermas, kondisi tersebut menunjukkan adanya dominasi sistem ekonomi dan kebijakan pembangunan terhadap kehidupan sosial dan lingkungan. Konsep kolonisasi *lifeworld* yang dirumuskan Habermas menggambarkan bagaimana sistem ekonomi-politik yang berorientasi pertumbuhan dapat mengintervensi dan mendominasi dunia kehidupan masyarakat, termasuk relasi mereka dengan lingkungan alam (Ardiansyah et al., 2024; Siber & Nurjati, 2022; Susanto et al., 2020). Kebijakan pemanfaatan ruang yang lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi menyebabkan kepentingan ekologis dan sosial menjadi kurang diperhatikan, sehingga keseimbangan antara manusia dan lingkungan menjadi terganggu dan memicu konflik ekologis seperti yang terjadi antara manusia dan gajah di Sumatera Selatan (Berliani, 2022; Kamim, 2018).

Secara keseluruhan, hasil kajian ini menunjukkan bahwa konflik manusia dan gajah merupakan persoalan yang bersifat multidimensional, yang tidak hanya berkaitan dengan aspek ekologis, tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan pembangunan, pengelolaan sumber daya alam, serta relasi kepentingan antara berbagai pihak yang terlibat dalam pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, penyelesaian konflik tersebut memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dengan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, perlindungan habitat satwa liar, serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam (Adisti et al., 2024; Muslih et al., 2023).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, konflik antara manusia dan gajah di Sumatera Selatan merupakan persoalan yang kompleks dan bersifat multidimensional, yang dipicu terutama oleh alih fungsi hutan menjadi kawasan industri, perkebunan, dan infrastruktur. Perubahan ini menyebabkan fragmentasi habitat dan penyusutan ruang hidup gajah, sehingga mendorong satwa tersebut memasuki wilayah permukiman manusia dan memicu konflik. Selain faktor ekologis, lemahnya implementasi kebijakan tata ruang serta dominasi kepentingan ekonomi dalam pembangunan turut memperparah kondisi tersebut. Dalam perspektif teori sosial kritis Jürgen Habermas, konflik ini mencerminkan dominasi sistem ekonomi dan kebijakan pembangunan terhadap kehidupan sosial dan lingkungan (*kolonisasi lifeworld*), yang mengabaikan keseimbangan ekologis. Oleh karena itu, penyelesaian

konflik manusia dan gajah tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui perumusan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, perlindungan habitat secara konsisten, serta pelibatan aktif masyarakat dalam upaya konservasi. Dengan langkah tersebut, diharapkan tercipta keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kelestarian lingkungan.

DAFTAR RUJUKAN

- Adisti, N. A., Banjarani, D. R., Aprita, S., Nurlani, M., & Hidayah, A. (2024). Restorasi Lingkungan Dalam Upaya Pemulihan Fungsi Lingkungan Dan Kesejahteraan Masyarakat Sumatera Selatan Sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) Menuju Net Zero Emission 2060 Berbasis Riset. *Seminar Nasional Avoer*, 16, 23–24.
- Ardiansyah, I., Hardinandar, F., Ridwan, & Firmanto, T. (2024). Kolonisasi Lifeworld: Telaah Teori Kritis Jürgen Habermas atas Kerusakan Lingkungan di Bima Nusa Tenggara Barat. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 13(1), 236–251.
- Berliani, K. (2022). Upaya Komprehensif Penanganan Konflik Gajah dan Manusia di Indonesia. *Jurnal Biologi, Teknologi Dan Kependidikan*, 9(1), 1–12.
- Elfi, M., Yoza, D., Suhada, N., & Erianto. (2025). Analisis Spasial Potensi Konflik Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*) dengan Manusia di Sekitar Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). *Jurnal Hutan Tropis*, 13(3), 432–443.
- Ferdian, N. R., Rahma, F., Hanif, A., Bhaltazar, M. G., Azizah, C. N., Ulfa, M., & Wahid, I. (2023). People's Perceptions of Human Elephant Conflict (HEC) and The Existence of Sumatran Elephants at CRU Sampoiniet Aceh Jaya, Indonesia. *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA*, 9(3), 1465–1469. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jppipa.v9i3.2425>
- Harahap, M. M., Telaumbanua, A. A., Zahrah, M., & Ulfa, M. (2025). Sebaran dan Karakteristik Spasial Konflik Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*) di Tiga Desa Penyangga Taman Nasional Gunung Leuser, Indonesia. *ULIN: Jurnal Hutan Tropis*, 9(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.32522/ujht.v9i2.21910>
- Kamim, A. B. M. (2018). Perebutan Ruang Kehidupan dan Gangguan terhadap Animal Rights: Studi Atas Konflik Satwa-Manusia sebagai Implikasi dari Ekspansi Perkebunan Sawit di Indonesia. *BALAIRUNG: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Indonesia*, 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/balairung.42056>
- Muslih, M., Zulhidayat, Z., Novita, Y., & Murjani, A. (2023). Upaya Konservasi Gajah Bersama Masyarakat Sekitar Kawasan di Kabupaten Bener Meriah. *Urnal Penelitian Dan Pengembangan Daerah*, 2(2), 166–175.
- Pratama, R. A., Winarno, G. D., Darmawan, A., & Harianto, S. P. (2023). Revitalisasi Konservasi Gajah Sumatera di Way Kambas dan Perlindungan Gajah yang Diambang Kepunahan. *Jurnal Thengkyang*, 8(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.31962/jurnal.v8i1.178>

-
- Rasyid, M. (2024). Revitalisasi Konservasi Gajah Sumatera: Strategi Penyelamatan dari Ancaman Kepunahan. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 5(2), 89–102.
- Setiawan, E. N., Maryudi, A., & Purwanto, R. H. (2018). Konflik Tata Ruang Kehutanan Dengan Tata Ruang Wilayah: Studi Kasus Penggunaan Kawasan Hutan Tidak Prosedural Untuk Perkebunan Sawit Provinsi Kalimantan Tengah. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 3(1), 51–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.31292/jb.v3i1.226>
- Siber, U., & Nurjati, S. (2022). Pengaruh Perubahan Tutupan Lahan Hutan terhadap Konflik Manusia dan Gajah Sumatera. *Jurnal Konservasi Hayati*, 18(1), 12–21.
- Susanto, A., Prasetyo, L. B., & Kartono, A. P. (2020). Fragmentasi Habitat dan Implikasinya terhadap Populasi Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*) di Sumatera Selatan. *Media Konservasi*, 25(2), 143–151.
- Wulandari, E., & Kusuma, A. F. (2023). Kelapa Sawit Indonesia: Dilema dan Solusi yang Tidak Kunjung Usai. *Khatulistiwa Profesional: Jurnal Pengembangan SDM Dan Kebijakan Publik*, 4(2), 57–68.
- WWF Indonesia. (2020). Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*): Status, Ancaman, dan Upaya Konservasi. In *WWF-Indonesia*.